

**PRAKTIK PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN NAGARI DI  
LURAH AMPALU KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN TAHUN**

**1983-2007**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora Pada*

*Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*

Oleh:

**SAFRI DANI**

**1410712023**

**DOSEN PEMBIMBING I: Dra. Iriana, M. Hum**  
**DOSEN PEMBIMBING II : Drs. Armansyah, M. Hum**



**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Praktik Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari Di Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 1983-2007”**. Nagari Lurah Ampalu memiliki sejarah yang cukup panjang dari awal didirikannya hingga sekarang. Masyarakat Lurah Ampalu menggantungkan hidup pada bidang pertanian sebagai sumber pendapatan utama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Proses awal yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan sumber dilakukan dengan cara studi pustaka dan lapangan dengan metode sejarah lisan atau wawancara. Setelah sumber-sumber diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka tahap selanjutnya melakukan metode kritik sumber dan menganalisis semua menjadi benang merah sejarah sebelum dituliskan dalam bentuk skripsi.

Sistem pemerintahan desa yang secara penerapannya di Sumatera Barat terjadi pada tahun 1983. Perubahan ini menyebabkan pola pemerintahan yang diterapkan di Sumatera barat dalam bentuk pemerintahan nagari, harus berubah menjadi sistem pemerintahan desa. hal ini tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Pengaruh baik yang ditimbulkan adalah semakin mudahnya proses masyarakat pengurusan administrasi bagi masyarakat dikarenakan kesatuan wilayah pemerintahan desa relatif kecil. Namun hal ini menimbulkan peniadaan pengaruh pemangku adat yang memiliki peran penting dalam tatanan pemerintahan nagari

Setelah menjalankan sistem pemerintahan desa hampir 20 tahun. Ketika pemberlakuan otonomi daerah, dimana daerah berhak menentukan pengelolaan daerahnya sendiri. Maka dalam hal ini Pemerintahan Sumatera Barat memutuskan kembali nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Menanggapi keputusan tersebut, masyarakat Lurah Ampalu melakukan rapat untuk membentuk kembali pemerintahan Nagari Lurah Ampalu yang dihadiri oleh ninik mamak, alim ulama, kepala desa dan masyarakat. Berdasarkan keputusan rapat tersebut masyarakat Lurah Ampalu setuju kembali pada sistem pemerintahan nagari. Serta penunjukan Amir Syam sebagai wali nagari sementara yang akan mengurus segala persiapan untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.

**Kata Kunci: Desa, Masyarakat, Nagari, Pemerintah**

## ABSTRACT

This research is entitled "Practices of Village Government and Nagari Governance in Ampalu Village Head, VII Koto District, Padang Pariaman Regency in 1983-2007". Nagari Lurah Ampalu has a fairly long history from its inception until now. The people of Ampalu Village depend on agriculture as their main source of income.

The research method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The initial process is to collect all sources related to the research. At the source collection stage, it is done by means of literature and field studies using oral history or interviews. After the sources are obtained, the next step is to classify them into primary sources and secondary sources. After all the required data has been collected, the next step is to carry out the source criticism method and analyze everything into a historical thread before it is written in the form of a thesis.

The village government system which was implemented in West Sumatra occurred in 1983. This change caused the pattern of government applied in West Sumatra in the form of nagari government, to be changed to a village government system. This certainly has a positive impact and a negative impact on society. The good effect is that it makes the process of community administration easier for the community because the unitary area of the village administration is relatively small. However, this has resulted in the negation of the influence of customary holders who have an important role in the governance of the nagari

After running the village government system for almost 20 years. When the implementation of regional autonomy, the regions have the right to determine their own regional management. So in this case the West Sumatra Government decided to return the nagari as the lowest government unit. In response to the decision, the Ampalu Lurah community held a meeting to re-establish the Nagari Lurah Ampalu government which was attended by ninik mamak, religious scholars, village heads and the community. Based on the decision of the meeting, the people of Lurah Ampalu agreed to return to the nagari government system. As well as the appointment of Amir Syam as temporary guardian of the nagari who will take care of all preparations for returning to the nagari government system.

Keywords: Village, Community, Nagari, Government

